

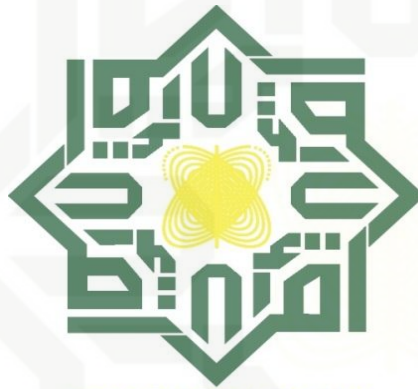
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO,
KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**UIN SUSKA RIAU****OLEH :**

MELANI PUTRI
NIM. 11721202895

PROGRAM S1**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.”** yang ditulis oleh :

Nama : **MELANI PUTRI**

NIM : 11721202895

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2021

Syukran, M.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MELANI PUTRI**
 NIM : **11721202895**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 24 Maret 2021**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

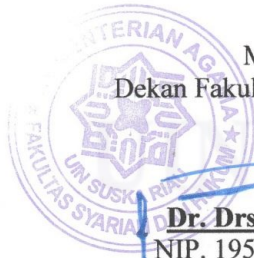
Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Ditinjau Menurut Hukum Islam di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota”** dilatarbelakangi oleh adanya bapak biologis yang menikahkan atau menjadi wali nikah anaknya yang lahir dari hubungan perzinahan yang terjadi di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota. Sedangkan dalam hukum Islam para ulama fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu qaul dari mazhab Syafii menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahkan atau menjadi wali anak perempuannya dari hasil zina. Jika lahir anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tidak berhak mendapatkan ahli waris, dan tidak berhak menjadi wali nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada wali nikah di Nagari Koto Lamo, 1 orang tokoh agama (wali hakim) serta 3 orang tokoh masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota dilaksanakan seperti pernikahan biasa pada umumnya. Hal ini dikarenakan ayah kandung dari mempelai perempuan menyembunyikan status anak perempuan hasil zina. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota yang diwalikan oleh ayah kandung secara biologis adalah dilarang karena seorang ayah biologis tidak berhak menikahkan atau menjadi wali nikah karena hilangnya hubungan nasab menurut syariat yang disebabkan oleh zina. Jika ayah kandung atau ayah biologis menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zinanya, maka pernikahan itu tidak sah.

Kata Kunci : Pernikahan, Anak Perempuan Hasil Zina, Hukum Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Asmardi dan Ibunda tercinta Lendrawati yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Imam Suyitno, M.Pd, beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Faris Fahrullah, MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga (Akhwal al-syaksiah) serta seluruh karyawan dan dosen yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Syukran, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ide dan saran kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Prof. Alaidin Koto, MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau terkhusus bapak Ahmad Fauzi, Bapak Zulfahmi yang telah memberi semangat serta ilmu tiada henti kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Kepala Kantor Wali Nagari Kecamatan Kapur IX, beserta masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta semangat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Para senior-senior yang telah membimbing dalam bidang ilmu agama Muhammad Ridwan Lc, Ust Agil Lc, Yanda Wira Pratama S.Or Muhammad Zaki SH, Husnul Amalia SH, Abdullah SH.
11. Sahabat yang setia kebersamai dalam perjuangan menyelesaikan skripsi yaitu Nur Fadillah, Annisa Ulhidayyah, Rani Mulana Sumita, Yulia Bakri, Rahmi Safitri, Tisa Oktaviani, Lidya Tiara Batubara, Armi Agustar, Risvi Juliani, Uly Santika Wulan Dr, Yona Amelia, Lestari dan Nabila Maharani.
12. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Nagari Koto Bangun Wige, Piwi, Yani, Afifah, Yasni, Hani, Wenti, Pido, Joy, Heri, Dayat.
13. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2017, terkhusus Hukum Keluarga lokal AH.A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball'alamin.

Pekanbaru, 17 Januari 2021
Penulis

MELANI PUTRI
NIM. 11721202895

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI NAGARI KAPUR IX	
A. Kondisi Geografis	14
B. Kondisi Demografis	15
C. Administrasi Nagari	15
D. Data Perangkat Nagari	16
E. Data Bamus Nagari	17
F. Data Monografi Desa/Nagari	17
G. Infrastruktur yang Ada di Desa	19
H. Kelembagaan Masyarakat yang Ada di Desa.....	20
I. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Ada Di Desa	21
J. Program yang Sudah Masuk Didesa	22
K. Angkatan Kerja	26
L. Pemasyarakatan P4 ,Kesadaran Berbangsa Dan Berpemerintahan	27
M. Kependudukan Dan Transmigrasi.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN NASAB KETURUNAN	
	A. Pengertian Wali Nikah	31
	B. Syarat-syarat Wali Nikah	33
	C. Nasab Anak Hasil Zina dalam Islam	37
	D. Status Anak Dalam kompilasi Hukum Islam	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pelaksanaan Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota	43
	B. Tinjauan Hukum Islam.....	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Perangkat Nagari	16
Tabel 2.2	Data Bamus Nagari	17
Tabel 2.3	Program yang Sudah Masuk Didesa	22
Tabel 2.4	Sektor Perkebunan/ Perladangan	23
Tabel 2.5	Sektor Peternakan	23
Tabel 2.6	Sektor Perikanan / Kenelayanan	23
Tabel 2.7	Sektor Pertambangan Galian C	24
Tabel 2.8	Sektor Industri Kecil / Kerajinan	24
Tabel 2.9	Sektor Industri Besar / Sedang	24
Tabel 2.10	Perdagangan	25
Tabel 2.11	Struktur Pemilikan Tanah	26
Tabel 2.12	Angkatan Kerja	26
Tabel 2.13.	Kualitas Angkatan Kerja dirinci menurut Pendidikan yang ditamatkan	27
Tabel 2.14	Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	27
Tabel 2.15	Toleransi dan keharmonisan antar Suku, Adat, Ras, dan Agama	28
Tabel 2.16	Peran serta penduduk dalam kegiatan pemilu pada dua periode PEMILU yang lalu	28
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk dirinci Menurut Golongan, Usia, Jenis Klamin	29
Tabel 2.18	Kepadatan Penduduk	29
Tabel 2.19	Kesehatan	29
Tabel 2.20	Pelestarian Pembangunan (dari Pemerintah / Swadaya).....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Pernikahan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya kumpul, maka nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.² Undang-undang no 1 tahun 1974 bab I pasal I disebutkan bahwa : “pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”³

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan pernikahan karena di balik sebuah pernikahan terdapat banyak sekali manfaat di

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua. hal. 456.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fqih munakahat kajian Fqih Kajian Lengkap*, (Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, 2009), cet. ke-1, hal.7.

³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004). hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipat gandakan pahala. Tak hanya itu, pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak serta kewajiban. Jalinan suci antara pria dan wanita dalam pernikahan merupakan ikatan yang mulia sehingga memberi tempat yang aman dan terlindungi untuk menyalurkan hasrat seseorang.⁴

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian mulai dari akad kedua belah pihak telah terikat.⁵

Islam telah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah tangga dengan kasih sayang, kecintaan dan ketentraman, hal ini dimaksud untuk mengembangkan keturunan, melahirkan generasi yang diberikan Allah SWT.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih disebut *Almuharramat Minal-Nisa*.

Sehingga bisa membentuk dan mendidik anggota keluarga dan anak-anak sesuai dengan ajaran syariat agama Islam dengan baik. Syariat Islam sangat memperhatikan segalanya baik pernikahan, thalak, mahar, keturunan dan lainnya. Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada

⁴ Imam Al Hakim, *Memikat Hati Suami* (Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009), cet. ke-2, hal. 5.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaga dari segala keharaman.⁶

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁷

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesamanya.

Pernikahan merupakan sunnatullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan.

Salah satu dari tujuan utama pernikahan adalah memperoleh keturunan untuk

⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). hal. 6.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006). hal. 756.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari fitrah naluri manusia itu sendiri. Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.⁸

Tetapi seiring perkembangan zaman, Pergaulan bebas antara muda-mudi banyak sekali terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya sentuhan budaya, sehingga pada saat ini menjadi gejala di masyarakat, menginap dalam satu ranjang yang sama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan.⁹

Menurut agama islam bersetubuh di luar akad pernikahan merupakan perbuatan zina perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksiat, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk dan mengundang kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (*Free Sex*) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat disamping perbuatan yang sangat nista.¹⁰

Sebagaimana Firman Allah Swt pada Surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Qs. Al-Isra ayat 32)

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). hal. 11-13.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hidayat Imam, Analisi Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 16 No. 1 Tahun 2016*. hal. 44.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan tentu tidak lepas dari status anak yang dilahirkan, baik yang dilahirkan sebagai akibat hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah maupun hubungan suami istri diantara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan pernikahan yang sah.

Dalam hukum Islam, hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut dikenal dengan istilah anak hasil zina.¹¹

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab). Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 bahwa laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak perempuan hasil zina karena anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan juga para ulama fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu qaul dari mazhab Syafii menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahkan anak perempuannya dari hasil zina. Jika lahir anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tidak berhak mendapatkan ahli waris, dan tidak berhak menjadi wali nikah.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bapak biologis tidak berhak menikahkan atau menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil

¹¹ *Ibid.* hal. 45.

¹² Ahmad Hatta, Abbas Mansur Tammam, dan Ahmad syahirul Alim, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta: Maghfiro Pustaka, 2014). hal. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

zinanya. Bahkan anak perempuan tersebut tidaklah memiliki wali untuk pernikahannya. Hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya yang tidak diakui oleh agama dan hanya mengakui hubungan antara anak dan ibu serta keluarga ibunya, maka ayah dan keluarga ayah tidak dapat menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuan biologisnya. Dengan demikian maka perwalian pindah dari wali nasab menjadi ditangan wali hakim.¹³ Perempuan hamil akibat perzinahan, menurut mazhab Hanafi, dan menurut mazhab Maliki jika anak lahir dari setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak di nasabkan anak kepada ayahnya.¹⁴

Namun pada kenyataannya, masih ada Bapak biologis yang menikahkan atau menjadi wali nikah anaknya yang lahir dari hubungan perzinahan, salah satu nya terjadi di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota yaitu Bapak Imen, Bapak Iyan, dan Bapak Oyong.

Banyaknya kasus hamil diluar nikah di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota menyebabkan banyak orang tua yang menyembunyikan status anak perempuan hasil zina ketika menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga perempuan anak hasil zina tersebut. Sehingga secara nyata, orang tua menyembunyikan status anak hasil zina tersebut dari anak perempuan yang diwalikan atau dinikahkan dan juga disembunyikan dari wali hakim pada pernikahan anak perempuannya.¹⁵

¹³ M. Lathoif Ghazali, Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam, *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008. hal. 493.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta, Gema Insani, 2011) hal. 145.

¹⁵ Ibuk Rossi Pipianti (Tokoh Masyarakat), wawancara. Jorong Koto Tuo, 21 Oktober 2020.

Berdasarkan Permasalahan ini Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus : Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota)”*.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya yaitu: pelaksanaan pernikahan anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum islam Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran dari Penulis di tempat Penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - c. Sebagai sarana informasi bagi masyarakat Islam, dari semua kalangan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap hukum menikahkan anak perempuan hasil zina oleh ayah kandungnya ditinjau menurut hukum islam di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa lepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.¹⁶ Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999). hal. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan mengenai pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX. Kabupaten 50 Kota.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Wali Nikah, Wali Hakim, Tokoh Masyarakat.
- b. Objek penelitian ini adalah Hukum Menikahkan Anak Perempuan Hasil Zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi data primer, data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Nagari Koto Lamo, baik melalui wawancara,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷

Sumber dari primer adalah orang-orang yang terlibat dalam menyaksikan pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 K.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studin dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan.¹⁸

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Penulis menggunakan teknik total sampling yang artinya menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, yaitu 3 orang wali nikah di Nagari Koto Lamo, 1 orang tokoh agama (wali hakim) serta 3 orang tokoh masyarakat sehingga jumlah sampelnya sebanyak 7 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). cet. ke-4, hal, 106.

¹⁸ *Ibid*, hal. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta panca indera lainnya.¹⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung kepada Wali Hakim, Wali Nikah, dan Tokoh masyarakat untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.

d. Studi kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²¹

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007) hal. 115.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 138.

²¹ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010), hal. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen dideskripsikan, dianalisis kemudian diinterpretasikan

8. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap hasil penelitian.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menetengahkan data khusus yang diambil dari fakta empiris, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka Penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN, yakni Gambaran Umum Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH, NASAB KETURUNAN meliputi Pengertian Wali Nikah, Syarat-syarat Wali Nikah, Nasab Anak Hasil Zina dalam Islam, Status Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA.

Pada bab ini penulis membahas beberapa point :

- a. Pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina ditinjau menurut hukum islam di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.
- b. Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota.

BAB V : PENUTUP, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI NAGARI KAPUR IX

A. Kondisi Geografis

1. Letak Nagari

Nagari Koto Lamo adalah salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX yang berada di bagian Timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Jarak tempuh wilayah Nagari Koto Lamo dari Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota 98 km. Nagari ini memiliki luas wilayah **10,036 Ha**, dengan potensi lahan yang produktif.²²

Adapun batas-batas Nagari sebagai berikut :

Sebelah Utara : Nag Muaro Paiti, Nag Koto Bangun, Nag Durian Tinggi

Sebelah Selatan : Kec.Bukit Barisan

Sebelah Timur : Nagari Lubuk Alai dan Kec.Pangkalan Koto Baru

Sebelah Barat : Nagari Sialang²³

2. Topografi Nagari

Nagari Koto Lamo memiliki kondisi daerah yang Perbukit bukit atau ditepi kawasan hutan, berada di atas ketinggian antara 200 m sampai 700 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang adalah Gambir, Karet , Kakao,

²² Profil Nagari Koto Lamo 2019.

²³ *Ibid.*

Sawit, Pinang dll, sedangkan tanaman jangka pendek adalah sayur-sayuran.²⁴

Daerah Perbukitan di Nagari Koto Lamo terdapat hutan Lindung seluas 5.000 Ha dan HPL seluas 5.000 Ha yang terpelihara dengan baik.

B. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Nagari Koto Lamo memiliki jumlah penduduk **868 KK (1,518 org** laki-laki dan **1,407 org** perempuan) sehingga jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak **2,925 jiwa**.²⁵

2. Sumber Mata Pencaharian Pokok.

Sumber mata pencaharian masyarakat di Nagari Koto Lamo yang utama adalah Petani/Pekebun yang hampir 90%. dan lainnya sekitar 10% meliputi: Tukang, Buruh Bangunan dan Dagang, PNS dan beberapa warga merantau keluar daerah untuk mencari nafkah. Masyarakat Koto Lamo banyak yg merantau ke Pekanbaru Riau.²⁶

C. Administrasi Nagari

Pusat pemerintahan Nagari Koto Lamo terletak di Jorong Koto Tuo dan untuk menuju Kantor Nagari dari pusat kecamatan berjarak 16 Km, dari pusat Pemerintahan Kabupaten berjarak 85 Km dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Nagari Koto Lamo tidak dapat dijangkau dengan kendaraan umum hanya dengan kendaraan Pribadi karena tidak berada di jalan poros yang terhubung langsung dengan pusat kota

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Kabupaten Lima Puluh Kota. Jalan raya Ke Koto Lamo sudah diaspal Hotmix sepanjang 10 KM dan masih ada 4 KM yang belum di aspal.²⁷

Secara administratif Nagari Koto Lamo terbagi atas 5 Dusun/Jorong yaitu:

1. Jorong Koto Tuo
2. Jorong Koto Tengah
3. Jorong Tanjung Bungo
4. Jorong Lolo
5. Jorong Sungai Nyanyiang²⁸

Setiap Jorong dipimpin oleh seorang Kepala Jorong sebagai pembantu Wali Nagari. Wali Nagari pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat Nagari melalui Bamus, dan prosedur pertanggung jawaban di sampaikan ke Bupati melalui Camat, kemudian dari pada itu Wali Nagari bersama dengan Bamus setiap tahun wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakatnya.²⁹

D. Data Perangkat Nagari

Tabel 2.1
Data Perangkat Nagari

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Anuar Dt Bosa	Wali Nagari	STM
2	Aprizal	Sekretaris Nagari	STM
3	Reni Susanti	Kasi Pemerintahan	SMEA
4	Yayang Andesko	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA
5	Elda Selja Putri,S.Pd	Kaur Umum dan Perencanaan	S1
6	Ica Hayatul Husnah	Kaur Keuangan	S1
7	Yelita	Staff Umum	SMA
8	Syahirman	Kepala Jorong Koto Tuo	SMP
9	Syafri	Kepala Jorong Koto Tengah	SMP

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
10	Epi Andesta	Kepala Jorong Tanjung Bungo	SMA
11	Syafril	Kepala Jorong Lolo	-
12	Sulman Efendi	Kepala Jorong Sungai Nyanyiang	SMP

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

E. Data Bamus Nagari

Tabel 2.2
Data Bamus Nagari

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Syafrina	Ketua Bamus	Keterwakilan Perempuan
2	Suparjo Rustam	Wakil Ketua Bamus	Unsur Alim Ulama
3	Seprianto, S.Pd	Sekretaris Bamus	Unsur Cerdik Pandai
4	Aliunir	Anggota Bamus	Unsur Jorong Tj Bungo
5	Candra Dt Intan Majo	Anggota Bamus	Unsur Ninik Mamak
6	Hanafi	Anggota Bamus	Unsur Pemuda
7	Caldesma Putra	Anggota Bamus	Unsur Jorong Sungai Nyanyiang

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

F. Data Monografi Desa/Nagari

1. Desa/Nagari : Koto Lamo
2. Kecamatan : Kapur IX
3. Kabupaten : Lima Puluh Kota
4. Provinsi : Sumatera Barat
5. Kependudukan
 - a. Jumlah Penduduk : 2,925 Jiwa
 - b. Jumlah Kepala Keluarga : 868 KK
 - c. Kepadatan Penduduk :
 1. Laki-laki : 1,518 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perempuan : 1,407 Orang
- d. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan
 3. Buta Aksara dan Angka : 184 orang
 4. Tidak Tamat SD : 805 orang
 5. Tamat SD : 1.187 orang
 6. Tamat SLTP : 381 orang
 7. Tamat SLTA : 322 orang
 8. Tamat Akademik (D1-D3) : 11 orang
 9. Sarjana S1 : 35 orang
 10. Sarjana S2 : orang
 11. Sarjana S3 : - orang
- e. Jumlah penduduk yang belum memiliki hak sipil (akta lahir, KK.KTP).....
- f. Mata Pencarian Penduduk
 - 1) Jumlah penduduk yang bekerja : 1.610orang
 - 2) PNS : 8 orang
 - 3) TNI Darat/ udara/ laut.... :
 - 4) POLRI :
 - 5) Tenaga kesehatan (dokter/bidan/perawat) : 5 orang
 - 6) Penduduk Usia Kerja : 1.750orang
 - 7) Penduduk Usia Kerja yang Bekerja : 1.610orang
 - 8) Penduduk Usia Kerja yang Belum Bekerja : 140 orang
 - 9) Pemilik tanah sawah : 250 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10)Pemilik Tanah Kebun	: 1.250 orang
11)Penyewa/penggarap	: -
12)Buruh tani	: 350orang
13)Jumlah pemilik usaha	: -
Jenis usaha	
a) Perbengkelan	: 9 orang
b) Pencucian	: 3 orang
c) Depot Air Minum Isi Ulang	: 3 buah
d) Jasa Perbankan/BRILINK	: 2 buah
e) Counter Cell	: 15 orang
f) 6. Kerambah Ikan	: 3 orang
14) Jumlah buruh kecil/ besar	: orang
15) Potensi Sumber alam yang ada di Nagari...	:
a) Batu, Kerikil, Tanah, Kayu	
b) Sungai (Mikro Hidro)	
c) Wisata Alam, (Air terjun, Wisata Hutan,)	
d) HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	
e) Bahan tambang (Batu Bara, Emas) ³⁰	

G. Infrastruktur yang Ada di Desa

1. Gedung Pertemuan	: 2	Ada
2. Gedung TK/Paud	: 3	Ada
3. Gedung Sekolah SD	: 3	Ada

³⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Gedung Sekolah SMP	: 1	Ada
3. Puskesmas/Puskesri	: 3	Ada
4. Rumah Sakit	: -	Tidak ada
5. Tempat Peribadatan		
12. Masjid	: 4	Ada
13. Gereja	: -	Tidak ada
14. Sarana ibadah lainnya Musallah	: 12	Ada
6. Bendungan, Waduk, Dam	: 1	ada
7. Sungai	: 4	Ada
(S, Btg Kopu Kecil, S. Btg Paiti, S. Btg Pingan, S.Btg Nyanyiang)		
8. Jalan Kabupaten	: 1 (14 km)	
9. Jalan Nagari/Lingkung	: 16 (17 KM)	
10. Jembatan Desa	: 12	Buah
11. Sumber Air Minum	: 3	Ada
(Pamsimas Muaro Pingan Tirta, Muruah Bening, Air Bersih Tanjung Bungo) ³¹		

H. Kelembagaan Masyarakat yang Ada di Desa

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	: Tidak Ada
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	: Ada
3. Karang Taruna (KT)	: 1 ada
4. Pekerja Sosial Masyarakat	: 1 ada
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial	: Tidak ada
6. POSYANDU	: 5 Ada

³¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pendamping KUBE, PKH

: Tidak ada

8. Yang lainnya

I. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Ada Di Desa

1. Jumlah anak terlantar	:	25	orang
2. Jumlah anak balita terlantar	:	6	orang
3. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	:	-	orang
4. Jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan	:	-	orang
5. Jumlah lanjut usia terlantar	:	63	orang
6. f. Jumlah Penyandang Disabilitas	:	-	orang
7. Jumlah Tuna Susila	:	-	orang
8. Jumlah Minoritas (gay, waria,Lesbi)	:	-	orang
9. Jumlah bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan	:	3	orang
10. Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA	:	-	orang
11. Jumlah Korban bencana alam	:	-	orang
sebutkan			
12. Jumlah Korban bencana sosial	:	-	orang
13. Jumlah keluarga bermasalah sosial psikologis	:	4	orang
14. Jumlah Fakir Miskin	:	138	orang
15. Jumlah Komunitas Adat Terpencil	:	-	orang
16. Jumlah Korban Tindak Kekerasan	:	-	orang
17. Jumlah Korban pekerja migran bermasalah sosial	:	-	orang
18. Jumlah Korban Trafficking	:	-	orang
19. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi	:	42	orang ³²

³² Ibid.

J. Program yang Sudah Masuk Didesa

1. Program Dari Kementerian Sosial
 - a. Program Keluarga Harapan 72 KK
 - b. Rastra 129 KPM
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
 15. Berapa kelompok
 16. Jenis Usaha
 - d. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS_RTLH) : 0 rumah
2. Program Dari Lintas Kementerian/Lembaga/ Dunia Usaha
 - a. Akta lahir (Dukcapil/ Kementerian Dalam Negeri) : Ada
 - b. e- KTP-NIK (Kementerian Dalam Negeri) : Ada
 - c. Dana Desa : Ada
 - d. Koperasi : Tidak Ada

Tabel 2.3
Program yang Sudah Masuk Didesa

No.	Angkatan Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Buta Aksara dan Angka	-
2.	Tidak Tamat SD	-
3.	Tamat SD	-
4.	Tamat SLTP	
5.	Tamat SLTA	
6.	Tamat Akademik (D1-D3)	
7.	Sarjana S1	
8.	Sarjana S2	
9.	Sarjana S3	
	Jumlah	

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Sektor Perkebunan/ Perladangan

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Pemilik Tanah Perkebunan	752 orang
2.	Buruh Perkebunan	210 orang
	Jumlah	849

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Tabel 2.5
Sektor Peternakan

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Ternak Sapi	-
2.	Jumlah Pemilik Ternak Kambing	15
3.	Jumlah Pemilik Ternak Ayam	38
4.	Jumlah Pemilik Ternak Kerbau	2
5.	Jumlah Pemilik Ternak Kuda	-
6.	Jumlah Pemilik Ternak Itik	12
7.	Jumlah Pemilik Ternak Domba	-
8.	Jumlah Buruh Peternak	-
	Jumlah	

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Tabel 2.6
Sektor Perikanan / Kenelayanan

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Kapal	-
2.	Jumlah Pemilik Perahu / sampan	-
3.	Jumlah Pemilik Penanam Rumput Laut	-
4.	Jumlah Pemilik Kolam	25
5.	Jumlah Pemilik Tambak	-
6.	Jumlah Pemilik Keramba Sejenisnya	5
7.	Jumlah Buruh Perikanan / Kenelayanan	-
	Jumlah	30

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.7
Sektor Pertambangan Galian C

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Usaha Pertambangan Galian C	-
2.		-
3.	Jumlah Pemilik Perdagangan Hasil Galian C Jumlah Buruh Usaha Pertambangan Galian C	-
	Jumlah	-

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Tabel 2.8
Sektor Industri Kecil / Kerajinan

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Usaha Kerajinan	6
2.	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	-
3.	Pemilik Usaha Industri Kecil	-
4.	Jumlah Buruh Industri Kecil/Kerajinan/Rumah Tangga	-
	Jumlah	-

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Tabel 2.9
Sektor Industri Besar / Sedang

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jumlah Pemilik Usaha Industri Besar	-
2.	Jumlah Pemilik Usaha Industri Sedang	-
3.	Jumlah Buruh Industri	-
	Jumlah	-

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.10
Perdagangan

NO.	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1.	Jasa Pemerintahan / Non Pemerintahan	
	a. Pegawai Negeri Sipil	
	1. Pegawai Nagari	4
	2. Guru	8
	3. Pegawai Negeri Sipil	9
	4. Kepolisian	1
	5. TNI - AD	2
	6. TNI - AL	-
	7. TNI - AU	1
	8. Bidan	3
	9. Perawat	1
	b. Pensiunan ABRI/ Kepolisian/ PNS	-
	c. Pegawai Swasta	6
	d. Pegawai BUMN	2
	e. Pensiunan Swasta	-
2.	Jasa Lembaga Keuangan	
	a. Perbankan	-
	b. Perkreditasi Rakyat	-
	c. Pegadaian	-
	d. Asuransi	-
3.	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Desa	3
	b. Warung	115
	c. Kios	10
	d. Kios Warnet	-
	e. Toko/Kedai	46
4.	Jasa Penginapan	
	a. Losmen	-
	b. Hotel	-
	c. Wisma	-
	d. Asrama Pondok	-
5.	Jasa Komunikasi dan Angkutan	
	a. Angkutan tak bermotor	-
	b. Angkutan sepeda Motor	-
	c. Angkutan Umum	8
	d. Perahu	-
	e. Kapal Motor Laut (KM)	-
6.	Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat	
	a. Notaris	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	b. Pengacara c. Konsultan Jasa Keterampilan	- - 10
	a. Tukang Kayu	16
	b. Tukang Batu	6
	c. Tukang Jahit/ Bordir	3
	d. Tukang Cukur	2
8.	Jasa Lainnya	3
	a. Listrik, Gas	1
	b. Depot Air Minum	1
	c. Konstruksi	-
	d. Jasa Persewaan	-
	e. Jasa Kemasyarakatan Umum dan Perorangan	-
9.	Jasa yang lain – lain	-
	Jumlah	

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Tabel 2.11
Struktur Pemilikan Tanah

NO.	LUAS PEMILIKAN TANAH	JUMLAH (ORANG)
1.	Kurang dari 0,1 Ha	
2.	0,1 – 0,5 Ha	10
3.	0,6 – 1,0 Ha	5
4.	1,1 – 1,5 Ha	27
5.	1,6 – 2,0 Ha	221
6.	3 – 5 Ha	98
7.	6 – 10 Ha	12
8.	Lebih dari 10 Ha	-
	Jumlah	328

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

K. Angkatan Kerja

Tabel 2.12
Angkatan Kerja

NO.	ANGKATAN KERJA	JUMLAH (ORANG)
1.	Penduduk Usia Kerja	1.750
2.	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	1.610
3.	Penduduk Usia Kerja yang Belum Bekerja	140

Sumber data: Profil Nagari Koto Lamo 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.13.
Kualitas Angkatan Kerja dirinci menurut Pendidikan yang ditamatkan

NO.	ANGKATAN KERJA	JUMLAH (ORANG)
1.	Buta Aksara dan Angka	12
2.	Tidak Tamat SD	760
3.	Tamat SD	887
4.	Tamat SLTP	281
5.	Tamat SLTA	300
6.	Tamat Akademik (D1-D3)	11
7.	Sarjana S1	30
8.	Sarjana S2	-
9.	Sarjana S3	-
	Jumlah	2,281

L. Pemasyarakatan P4 ,Kesadaran Berbangsa Dan Berpemerintahan

A. Kesadaran Berpemerintahan Dan Berbangsa

Tabel 2.14
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Jumlah Wajib Pajak PBB	632
2.	Jumlah Wajib Pajak PBB yang bermukim diluar Desa	-
3.	Target Penerimaan Pajak PBB	8,322,500
4.	Jumlah Wajib Pajak yang telah melunasi Realisasi Penerimaan Pajak PBB	632
5.		8,322,500

Tabel 2.15
Toleransi dan keharmonisan antar Suku, Adat, Ras, dan Agama

NO.	URAIAN	JLH.KEJADIAN
1.	Perpecahan umat intern agama	-
2.	Pertentangan antar umat beragama	-
3.	Perbedaan antar ras	-
4.	Kejadian perang antar suku	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.16
Peran serta penduduk dalam kegiatan pemilu
pada dua periode PEMILU yang lalu

NO.	URAIAN	PEMILU TAHUN 2014	PEMILU TAHUN 2019	KETERANGAN
1.	Jumlah Penduduk yang telah memiliki hak pilih		2,181	
2.	Jumlah Penduduk yang menggunakan hak pilihnya		1.815	

M. Kependudukan Dan Transmigrasi

A. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah Penduduk Seluruhnya : 2,925 Jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga : 868 KK
3. Jumlah Penduduk dirinci menurut golongan,usia,jenis kelamin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk dirinci Menurut Golongan, Usia, Jenis Klamain

NO.	GOLONGAN UMUR	JENIS KLAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	0-4 Tahun	80	42	122
2.	5-9 Tahun	122	96	218
3.	10-14 Tahun	157	176	333
4.	15-19 Tahun	145	132	277
5.	20-24 Tahun	136	160	296
6.	25-29 Tahun	132	105	237
7.	30-34 Tahun	152	161	213
8.	35-39 Tahun	142	115	257
9.	40-44 Tahun	114	116	230
10.	45-49 Tahun	78	84	162
11.	50-54 Tahun	76	63	139
12.	55-59 Tahun	58	60	118
13.	60-64 Tahun	49	48	97
14.	65-69 Tahun	28	19	47
15.	70-74 Tahun	15	18	33
16.	75 Keatas	19	36	55

B. KEPADATAN PENDUDUK

Tabel 2.18
Kepadatan Penduduk

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	1,518
2.	PEREMPUAN	1,407
3.	JUMLAH SELURUHNYA	2,925
4.	KEPADATAN PENDUDUK	-

Tabel 2.19
Kesehatan

NO.	URAIAN	JUMLAH ORANG
1.	Apotek	-
2.	Rumah Sakit Umum	-
3.	Rumah Bersalin	-
4.	Poliklinik	-
5.	Posyandu	5
6.	Puskesmas/Postu	3
7.	Dokter Praktek	-

Tabel 2.20
Pelestarian Pembangunan
(dari Pemerintah / Swadaya)

NO .	KEGIATAN PEMBANGUNAN	BIAYA	
		MASIH BERJALAN/ TERHENTI	MANFAAT ADA/TDK ADA
1.	Gedung Sekolah	3 Berjalan	- ADA
2.	Tempat Peribadatan	15 Berjalan	-ADA
3.	Gedung Serba Guna	1 Berjalan	-ADA
4.	Bendungan, Waduk, Dam	-	Tidak Ada
5.	Saluran Air		Ada
6.	Jalan, Jembatan Desa	7 Berjalan	Ada
7.	Sumber Air Minum	3 Berjalan	Ada
8.	Pelestarian Lingkungan Lain-lain		-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

DAN NASAB KETURUNAN

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam islam dikenal dengan al-walayah, yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*).³³ Dalam pernikahan Islam, wali nikah adalah orang yang menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan aturan Islam.

Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.³⁴ Wali dalam perkawinan merupakan hal yang penting. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan,, Hadist Rasulullah Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ
وَالْتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ جَبَّانَ

Artinya: *Rasululullah Saw bersabda tidak sah nikah tanpa ada wali riwayat Ahmad, dan Imam yang empat hadist Shahih menurut Ibnu Al-Mandili, Tarmzdi, Ibnu Hibban,*³⁵

³³ Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", Isti'dal; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150. hal.73.

³⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di Indonesia", *Jurnal Al-'adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011. hal. 167.

³⁵ Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*. hal. 1008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu :

وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رُشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya : *Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.*” (HR. Abu Dawud, kitab *Ath-Thalaq*, Bab *Fi Iddi'a` Walad Az-Zina* no. 2266)

Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah.³⁶ Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, berulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al- Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali hukumnya tidak sah.³⁷

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.³⁸

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. ke-1, hal 218- 220.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), cet. ke-1, hal. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pentingnya wali bagi wanita dalam akad nikah, selain karena merupakan perintah agama juga disebabkan karena wanita adalah makhluk mulia yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh sang pencipta dan mempunyai satu kedudukan yang dapat menjaga martabat, kemanusiaan dan kesuciannya serta merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.

B. Syarat-syarat Wali Nikah

Orang yang akan menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hakim maka perwaliannya tidak sah.

Tidak ada wali nikah, kecuali dari jalur laki-laki. Anak perempuan dari hasil hubungan zina tidak memiliki bapak. Bapak biologis bukanlah bapaknya. Dengan demikian, dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak biologis. Bapak biologis, kakek, maupun paman dari bapak biologis, tidak berhak menjadi wali.

Untuk itu orang yang dipilih menjadi wali ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Berikut ini adalah syarat-syarat wali menurut syariat islam.³⁹

³⁹ Aizid Rizem, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana 2018), cet. ke-1, hal.100.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adil

Wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”⁴¹

2. Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah SWT surat al-Imran[3] ayat28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Artinya : “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.*

⁴⁰ Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164.* hal. 160.

⁴¹ Departemen Agama RI al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan Daarul Quran Nusantara, 2009). hal. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”

3. Baligh

Baligh (*orang mukallaf*), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.⁴²

4. Laki-laki

Adapun yang menjadi wali ialah pihak laki-laki, perempuan tidak diperkenankan. Ulama Hanafiyah dan Syi‘ah Imamiyah berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

5. Merdeka

Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya yaitu orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

6. Tidak kafir, fasik, atau murtad

7. Bukan dalam ihram haji atau umrah

⁴² Tali Tulab, *op.cit*, hal. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Waras (tidak gila atau cacat pikirannya)

9. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak dari kalangan ulama mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Mazhab selain Imamiyah mengatakan : Tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, hakim dan orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.⁴³

Beberapa pendapat tentang syarat-syarat wali ini dapat diringkas, bahwa wali adalah harus orang yang mukallaf, Islam, adil (cerdas), dan laki-laki. mukallaf adalah orang yang terkena beban hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mukallaf ini dalam istilah ushul fiqh disebut mahkum 'alaih. Syarat sahnya seorang mukallaf menerima beban hukum adalah harus sanggup memenuhi pembebanan baik langsung atau melalui perantara, dalam hal ini adalah sanggup memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Para ahli ushul membagi kemampuan ini kepada dua macam. Pertama, ahliyatul wujub (kemampuan menerima hak dan kewajiban) yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban.

Kepantasan ini ada pada setiap manusia dalam semua keadaan. Dengan kata lain semua orang yang mempunyai kepantasan di beri hak dan kewajiban,

⁴³ Achmad Hadi Sayuti, "Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazdhab Dan Hukum Positif". *Skripsi Hukum Keluarga Program Sarjana Syari'ah*, (Jakarta:2011), Tidak Dipublikasikan. hal 28.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebab dasar kepantasan ini adalah kemanusiaan. Selama ia masih hidup. Kedua, ahliyatul ada' ialah kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Keadaan manusia dihubungkan dengan ahliyatul ada' ada tiga macam:

1. Adakalanya seseorang tidak mempunyai ahliyatul ada' sama sekali, misalnya anak-anak yang belum dewasa dan orang gila.
2. Adakalanya seseorang tidak mempunyai ahliyatul ada' yang kurang sempurna, seperti anak-anak yang mumayyiz, yaitu anak-anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk.
3. Adakalanya seseorang tidak mempunyai ahliyatul ada', yang sempurna, yaitu orang-orang yang dewasa dan berakal.⁴⁴

Persyaratan tentang wali lebih rinci dijelaskan dalam buku pedoman pembantu pencatat nikah, yaitu: beragama islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang laki-lakinya adil, tidak sedang ikram, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah, tidak rusak pikiran dan merdeka.⁴⁵ Pada prinsipnya dari beberapa pendapat-pendapat tidak ada perbedaan yang mendasar.

C. Nasab Anak Hasil Zina dalam Islam

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham

⁴⁴ Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah bagi Ayah Pelaku Incest terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1, Februari 2018, hal. 181.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, (Jakarta:1985:1986), cet. ke-1, hal.12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa pernikahan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan pernikahan. Dalam pernikahan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus dengan ayahnya, sedangkan antara anak dengan ibu tidak terputus. Anak dengan ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak syarī,⁴⁶

Dalam suatu pernikahan terutama pernikahan yang dilaksanakan sesuai syariat islam, tentunya bertujuan untuk membangun rumah tangga ataupun keluarga termasuk memiliki anak atau keturunan.

Kata nasab sering digunakan untuk menyebutkan kata keturunan dan dalam islam sendiri, nasab memiliki peranan yang penting terutama menyangkut beberapa hal seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya.

Kata nasab berasal dari bahasa arab yakni kata “an nasab” yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yakni keturunan atau kerabat. Kata nasab juga berarti memiliki ciri atau memberikan karakter keturunannya.

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia kata nasab itu sendiri tidak memiliki perbedaan arti atau pergeseran makna.

⁴⁶ Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017. hal. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ulama dari kalangan madzhab maliki dan hambali berpandangan tidak boleh menikahi wanita yang hamil karena zina. Baik yang menikahi itu lelaki yang menghamili atau bukan. Bila keduanya menikah, tidak boleh berhubungan dan harus akad lagi ketika anak dalam kandungan itu lahir. Pendapat ini berdasarkan pada teks eksplisit ayat yang menyebutkan bahwa ‘iddah wanita hamil itu sampai melahirkan.

Apabila lelaki dan wanita yang hamil karena zina itu menikah, sedangkan anaknya itu hasil dari hubungan keduanya sebelum menikah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Ia tidak saling mewarisi dengan ayahnya. Ayahnya juga tidak bisa menjadi wali. Hubungan keduanya seperti hubungan ayah tiri, walau pun secara biologis anak itu adalah darah dagingnya.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa seorang anak yang lahir dari zina tidak akan mendapatkan hak nasab ayah biologisnya. Bila seseorang menikahi wanita yang pernah berzina dengannya dan mengandung anak biologisnya, lalu keduanya menikah sebelum anak itu lahir, secara administrasi ia bisa menjadi anak kandung atas ayahnya. Hanya saja, dalam hal perwalian nikah dan hak waris mengikuti nasab ke ibunya. Untuk perwalian nikah, yang menjadi wali adalah hakim. Sedangkan untuk warisan, ayahnya bisa memberikan bagian pada anak tersebut lewat wasiat atau hibah.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, atau orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah, Khalifah, Penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya (bapak zinanya). Artinya, hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus. Demikian juga dengan hukum waris terputus dengan bapaknya, dia hanya mewarisi ibunya dan ibunya mewarisinya. Demikian juga hak kewalian jika seorang anak perempuan terputus dengan bapaknya, yang menjadi wali nikahnya adalah sultan (penguassa) atau wali hakim.

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 bahwa laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak wanita hasil zina karena anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Para ulama fiqih dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan salah satu qaul dari mazhab Syafii menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina. Jika lahir anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, tidak berhak mendapatkan ahli waris, dan tidak berhak menjadi wali nikah⁴⁷.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلَمٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّيَّادِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي جَاهِلِيَّةٍ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

⁴⁷ Ahmad Hatta, dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, loc. cit, hal. 276.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Mu’tamir dari Salm bin Abu Az-Zinad, telah menceritakan kepadaku sebagian sahabat kami, dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “Tidak ada perzinahan dalam islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barang siapa yang mengkalim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”*.⁴⁸

D. Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, juga dikenal anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁹

⁴⁸ Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, Juz6, hal.184.

⁴⁹ Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departememn RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : 2001). hal. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) ., cet. ke-2, hal 159-160.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota dilaksanakan seperti pernikahan biasa pada umumnya. Hal ini dikarenakan ayah kandung dari mempelai perempuan menyembunyikan status anak perempuan hasil zina. Sehingga wali hakim dan tokoh agama serta tokoh adat tidak mengetahui status anak tersebut. Sikap yang diambil oleh wali nikah yaitu ayah kandung secara biologis juga merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum Islam.
2. Menurut tinjauan hukum Islam pernikahan anak perempuan hasil zina di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota yang diwalikan oleh ayah kandung secara biologis adalah dilarang. Meskipun secara biologis, ia adalah seorang ayah bagi anak perempuannya, tetapi seorang ayah biologis tidak berhak menikahkan atau menjadi wali nikah karena hilangnya hubungan nasab menurut syariat yang disebabkan oleh zina.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan kepada orang tua di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak perempuan dalam pergaulan untuk meminimalisir perbuatan zina.
2. Diharapkan kepada masyarakat umum dan khususnya orang tua di Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 agar tidak menyembunyikan status anak zina dalam proses pelaksanaan pernikahan hanya karena untuk menjaga martabat keluarganya dan lebih meningkatkan pemahaman ilmu agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurrahman Al-Juzairi,. 1996. *Al-Fiqh, ala madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Fikr, Beirut
- Abu Daud, Sunan Abu Daud dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah versi 2.09, Juz6.
- Achmad Hadi Sayuti, 2011. " Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazdhab Dan Hukum Positif". *Skripsi Hukum Keluarga Program Sarjana Syari'ah*, Jakarta
- Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah bagi Ayah Pelaku Incest terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1, Februari 2018
- Ahmad Hatta, Abbas Mansur Tammam, dan Ahmad syahirul Alim, 2014. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Maghfiro Pustaka
- Ahmad Rofiq, 2001. *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aizid Rizem, 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Jakarta: Laksana
- Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan*, Cet-II, Jakarta : Rajawali Pers
- Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, 1999. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius
- As-Syekh 'Imad Ad-Din Ahmad 'Iffat 'Afifi, 2018. *Al-Jawahirul Azhariah Wadhurarul 'Imadiyah* Yordania: Darul Fath
- Beni Ahmad Saebani, 2001. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia
- Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media,
- Dep Dikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya 2009. Jakarta: Yayasan Daarul Qur'an Nusantara,
- Departemen Agama RI, 1985:1986. Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Jakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Emzir, 2010.. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Fransisca Ismi Hidayah,” Diskursus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat”, Isti’dal; *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150.
- Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, Alam Al-Muwaqi’in ‘an Rabb Al-Alamin, Dar Al-Arabi, Jilid 4.
- Imam Al Hakim, 2009. *Memikat Hati Suami*, cet 2; Surakarta: Penerbit Insan Kamil
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min adillatil Ahkam*.
- Imam Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011).
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- M. Lathoif Ghazali, *Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam*, Al-Qanun, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
- Mahmud Yunus, 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung,
- Memed Humaedillah, 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* Jakarta : Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Musthafa Dib Albugha, 2019. *At-Tadzhibu Fi Adillati Matnil Ghoyati Wattaqriib* Damaskus: Darul Musthafa
- Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir diluar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.
- Nurul Irfan, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah
- Rofiq Ahmad, 1998. *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soedharyo Soimin, 2002. *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika,

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Tali Tulab, “Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, 152-164*.

Tihami, Sohari Sahrani, 2009. *Fqih munakahat kajian Fqih kajian Lengkap*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal I Jakarta: PT sinar Grafika, 2004.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola.

Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta, Gema Insani,

Wahyu Widiana, Ma, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : 2001.

Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian



Wawancara dengan wali hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan wali nikah



Wawancara dengan wali nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan wali nikah



Wawancara dengan tokoh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan tokoh masyarakat



Wawancara dengan tokoh masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MELANI PUTRI**
 NIM : 11721202895
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

1. Nama : Melani Putri
2. Alamat Sesuai KTP : Koto Tuo, Desa Koto Lamo, Kec. Kapur IX
3. Pekerjaan : Mahasiswi
4. Nomor Telepon/HP : 082386854746
5. Nomor KTP : 1307076003990003
6. Judul Penelitian : PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS : NAGARI KOTO
LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA)

Dengan ini menyatakan bahwa melaksanakan kegiatan penelitian/survey akan mentaati dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Padang, 15 Oktober 2020
Peneliti/Penanggung Jawab/Koordinator



(Melani Putri)

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Oktober 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6296/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MELANI PUTRI
NIM	: 11721202895
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: NAGARI KOTO LAMO

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS : NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX,
KABUPATEN 50 KOTA)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/35828
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6296/2020 Tanggal 14 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

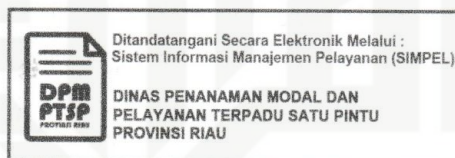
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MELANI PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11721202895 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS : NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : NAGARI KOTO LAMO SUMATRA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatra Barat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
http://dpmpstps.sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 570/1990-PERIZ/DPM&PTSP/X/2020

Rekomendasi Penelitian

Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6296/2020 tanggal 14 OKTOBER 2020 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : MELANI PUTRI
Tempat/Tanggal lahir : KOTO TUO, 20-03-1999
Pekerjaan : MAHASISWI
Alamat : KOTO TUO
Nomor Kartu Identitas : 1307076003990003
Judul Penelitian : PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS : NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA)
Lokasi Penelitian : NAGARI KOTO LAMO SUMATRA BARAT
Jadwal penelitian : 14 OKTOBER 2020 – MARET 2021
Penanggung Jawab : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 16 Oktober 2020
A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik yang dipublikasikan secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WALI NAGARI KOTO LAMO
KECAMATAN KAPUR IX

REKOMENDASI

No. 300/61A/ PEM-KL/IX/2021

TENTANG
 IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6296/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Mohonan Pengantar Izin penelitian, dengan ini Wali Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Penelitian kepada :

Nama : MELANI PUTRI
 NIM :
 Tempat/Tgl lahir : KOTO TUO, 20-03-1999
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Jrg Koto Tuo, Nag Koto Lamo Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota.

Judul Penelitian : PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINAH
 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
 (STUDI KASUS : NAGARI KOTO LAMO
 KECAMATAN KAPUR IX, KAB. LIMA PULUH
 KOTA)

Lokasi penelitian : NAGARI KOTO LAMO SUMATERA BARAT

Waktu/Lama Penelitian : 14 OKTOBER 2020 – MARET 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada Pemerintah setempat / Kepala Jorong dan menjelaskan kedatangan dan tujuannya serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati tatanan yang ada di masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (Satu) rangkap kepada Wali Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Pulu Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini akan di tarik kembali.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Koto Lamo, 20 Oktober 2020

Wali Nagari Koto lamo

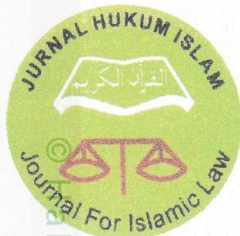


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MELANI PUTRI
NIM : 11721202895
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO,
KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA

Pembimbing: Syukran, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

StatIslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Melani Putri, lahir di Koto Tuo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota, pada tanggal 20 Maret 1999 dari pasangan ayahanda Asmardi dan ibunda Lendrawati. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Sekolah Dasar Negeri 01 Koto Tuo, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP di MTsN Koto Nan Gadang dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA di MAN 2 Payakumbuh dan lulus pada tahun 2017, juga penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi hHukum Keluarga Strata satu (S1). Pada tahun 2021 dibawah bimbingan Bapak Syukran , M.Sy. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul: “PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DI NAGARI KOTO LAMO, KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN 50 KOTA”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.